

## JURNAL SOSIAL DAN POLITIK

### **Pelembagaan Perilaku Mengemis di “Kampung Pengemis” (Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)**

**Arzena Devita Sari (071114034)**

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

#### **ABSTRAK**

Pelembagaan perilaku mengemis merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada “Kampung Pengemis” di desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dimana mayoritas masyarakatnya menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian utama. Di desa tersebut perilaku mengemis dilembagakan secara turun-temurun sejak pra kemerdekaan. Selain itu, perilaku mengemis dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* dengan oknum-oknum tertentu.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 3 informan utama (pengemis) dan 4 informan pendukung (masyarakat sekitar, Dinas Sosial dan MUI). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang diambil menggunakan teknik *purposive*. Analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori kelembagaan dan kapital sosial oleh Norman T. Uphoff.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku mengemis telah menjadi budaya dan dijaga kelestariannya secara turun-temurun sejak zaman pra-kemerdekaan dengan menjalankan sebuah tradisi yaitu seseorang harus menjadi pengemis jika akan atau ingin menikah dengan masyarakat yang berasal dari “Kampung Pengemis” di desa Pragaan Daya. Kondisi perekonomian mayoritas masyarakat yang menjadi pengemis di desa Pragaan Daya sangat berkecukupan dan jauh dari garis kemiskinan. Penghasilan yang mereka dapatkan juga tergolong fantastis. Manifestasi dari hasil mengemis berupa rumah, kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil dan beberapa hewan ternak seperti sapi. Modus mengemis yang digunakan berbeda-beda, yaitu pengemis konvensional, non-konvensional dan pengemis musiman. Pengemis di desa Pragaan Daya menjadikan perilaku mengemisnya sebagai jasa dalam sebuah bisnis *mutual benefit*. Modus ini hanya berlaku untuk pengemis non-konvensional, dimana pengemis bekerjasama dengan oknum tertentu yang menjadi pengurus atau penanggungjawab sebuah lembaga seperti pondok pesantren, madrasah maupun masjid. Pengurus atau penanggungjawab tersebut menyediakan fasilitas berupa proposal sumbangan fiktif, sedangkan pengemis

hanya perlu menggunakan perilaku mengemisnya untuk mencari penghasilan. Dalam hubungan kerjasama ini, ada kesepakatan antara kedua atau lebih pihak mengenai pembagian hasil.

*Kata Kunci: Pelembagaan, Perilaku, Mengemis, Kapital Sosial*

### **ABSTRACT**

Institutionalization begging behavior is an interesting phenomenon to be researched. This research focused on the “Kampung Pengemis” in the Pragaan Daya village, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep where the majority of people make begging as the main livelihood. In the village, begging behavior instituted by generations since pre-independence. In addition, begging behavior utilized in cooperation relationship of mutual benefit with certain people.

This research uses the interpretive paradigm of qualitative descriptive method. Informants in this research amounted to 7 people, i.e. 3 key informants (beggars) and 4 additional informants (society, the Department of Social and MUI). Data collected by in-depth interview to the informant that was taken using purposive technique. Analysis of problems in this research using two theories, that is the theory of institutional and social capital by Norman T. Uphoff.

Based on the research that has been done, it can be concluded that the behavior of begging has become a cultural and preserved from generation to generation since pre-independence by doing a tradition that one must become beggars if it will or want to marry people from “Kampung Pengemis” at Pragaan Daya village. The economic condition the majority of people who become beggars in the Pragaan Daya village very affluent and far from the poverty line. Income that they get also quite fantastic. Manifestations of begging in the form of houses, vehicles such as motorcycles or cars and several farm animals such as cattle. Beggars mode used different, that is beggar conventional, non-conventional and seasonal beggars. Beggars in the Pragaan Daya village make begging behavior as means in a mutual business benefit. This mode only applies to non-conventional beggars, where beggars in collaboration with a certain person who becomes caretaker or person in charge of an institution such as boarding schools, madrasas and mosques. The caretaker provides facilities such proposal fictitious donations, while a beggar only need to use behavioral begging to earn money. In this cooperative relationship, there is an agreement between two or more parties about sharing the income.

*Keywords : Institutionalization, Behavior, Begging, Social Capital*

## **Pendahuluan**

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan kota besar lainnya di Indonesia, sering dijumpai sosok pengemis. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum atau ke rumah-rumah dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain.<sup>1</sup> Sedangkan mengemis adalah sebutan untuk pekerjaan atau kegiatan atau perilaku meminta-minta yang dilakukan pengemis. Biasanya hal yang diminta berupa materi seperti uang, pakaian, makanan dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial Indonesia, pada tahun 2012 jumlah pengemis di Indonesia tercatat 178.262 jiwa<sup>2</sup>. Selain itu pada tahun 2012 Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 15, naik ke peringkat 5 dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia.<sup>3</sup> Tentu saja prestasi Indonesia dalam kasus tersebut bukan merupakan hal yang patut dibanggakan.

Ada dua tipe pengemis, yakni pengemis miskin materi dan pengemis miskin mental.<sup>4</sup> Pengemis miskin materi adalah pengemis yang kondisi ekonominya memang sulit atau tidak mampu, sehingga mereka memutuskan untuk mencari penghasilan lewat mengemis. Pada tipe ini, pengemis sangat erat berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Soerjono Soekanto (1982)

---

<sup>1</sup> PERDA Kabupaten Sumenep No. 03 tahun 2002 pasal 1 tentang Ketertiban Umum

<sup>2</sup> [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id) diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 11.10

<sup>3</sup> Dimas, 2013. *Pengemis Undercover*. Titik Media. hal.28

<sup>4</sup> Ibid hal.5

mengartikan kemiskinan sebagai keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>5</sup>

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), konsep kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.<sup>6</sup> Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen).<sup>7</sup> Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang terus diatasi oleh pemerintah negara Indonesia.

Sedangkan pengemis miskin mental adalah pengemis yang kondisi ekonominya masih tergolong mampu, namun mereka tetap mengemis karena mereka memiliki mental malas untuk berusaha mencari penghasilan lewat pekerjaan yang lebih layak.

Menurut Mohammad Ali Al Humaidy dalam tesisnya, secara umum orang mengasumsikan bahwa munculnya pengemis adalah karena himpitan ekonomi, ditambah dengan situasi sosial yang kurang menguntungkan seperti sempitnya

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Press (Soekanto, 1982: 10)

<sup>6</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 17.36 WIB

<sup>7</sup> Ibid

lapangan kerja.<sup>8</sup> Di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal tersebut membuat jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang profesional, Indonesia masih menjadi negara yang mementingkan kualitas latar belakang pendidikan seseorang. Lapangan pekerjaan yang sempit, jumlah penduduk yang padat dan rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki akan membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kualitas pendidikan yang dimiliki para pengemis juga terbilang sangat buruk. Banyak diantara mereka hanya lulusan sekolah dasar atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Fenomena tersebut mengakibatkan mereka memilih ‘jalan pintas’ untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu salah satunya dengan cara mengemis. Mengemis tidak membutuhkan *skill* khusus. Seseorang sudah bisa menjadi pengemis hanya dengan berbekal penampilan *compang-camping* dengan mimik wajah yang membuat orang yang melihatnya merasa iba ketika sedang melakukan kegiatan memintaminta. Kegiatan mengemis dilakukan di beberapa tempat umum seperti lampu merah, pertokoan, pasar tradisional, jembatan penyeberangan, stasiun, tempat ibadah, tempat wisata, angkutan umum hingga ke rumah-rumah masyarakat.

Sebuah fenomena unik terjadi di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep – Madura yaitu dimana hampir seluruh penduduk di desa tersebut mencari penghasilan lewat mengemis. Peneliti tidak menemukan fakta

---

<sup>8</sup> Mohammad Ali Al Humaidy, 2003. Thesis *Sosialisasi Nilai pada Komunitas Pengemis : Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Sumenep Madura*. Hal.1

bahwa pengemis di desa Pragaan Daya berada dalam kondisi perekonomian yang sulit atau miskin. Bangunan rumah yang megah dengan antena parabola, perhiasan emas yang dikenakan, *handphone*, kendaraan bermotor serta beberapa hewan ternak yang dimiliki oleh para pengemis menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian mereka tergolong berkecukupan. Selain itu, kondisi fisik mereka juga masih tergolong kuat dan sehat. Maka pengemis di desa tersebut termasuk tipe pengemis miskin mental.

Masyarakat umum mengasumsikan pengemis berkaitan dengan situasi perekonomian yang sulit, kurang atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maupun keterbatasan fisik dan *soft skill* untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentu saja hal ini menjadi masalah sosial karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu apa yang seharusnya tidak sama dengan yang senyatanya.

Kasus tersebut pun telah membuat MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sumenep mengeluarkan fatwa haram mengemis. Apalagi mengetahui kondisi fisik dan ekonomi para pengemis di desa Pragaan Daya, tentu saja mereka masih mampu mencari uang atau penghasilan dengan cara yang lebih terhormat. Namun, tetap saja para penduduk di desa tersebut menjadikan mengemis sebagai sumber mencari penghasilan.

Menurut hasil razia gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 hingga tahun 2014, tercatat 124 orang menjadi gelandangan dan pengemis. Sebanyak 41 orang atau sekitar 33% dari hasil razia tersebut berasal dari kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Selain memperkuat bukti bahwa fatwa haram yang dikeluarkan MUI di Kabupaten Sumenep tidak dihiraukan oleh para pengemis, hal ini juga membuktikan bahwa para pengemis di desa Pragaan Daya masih beroperasi sampai saat ini.

Dalam tesisnya, Mohammad Ali Al Humaidy juga menjelaskan bahwa mengemis terbagi menjadi dua jenis yakni pengemis konvensional dan non-konvensional. Mengemis konvensional adalah mengemis dengan cara memelas, mengulurkan tangan dengan pakaian *compang-camping* seperti gelandangan. Sedangkan pengemis non-konvensional adalah mengemis dengan penampilan lebih rapi (mengenakan celana atau sarung lengkap dengan kopyah), membawa surat “resmi” dari lembaga/yayasan dan surat jalan dari pemerintah. Pengemis di desa Pragaan Daya menggunakan modus konvensional dan non-konvensional.

Selain fakta yang menyebutkan bahwa para pengemis tersebut berada dalam kondisi perekonomian dan fisik yang baik, hal ini menjadi lebih menarik lagi karena para pengemis di desa Pragaan Daya memanfaatkan perilaku mengemisnya. Perilaku mengemis dimanfaatkan dan digunakan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* dengan seorang oknum yaitu pengurus atau penanggungjawab sebuah madrasah/pondok pesantren yang menyediakan proposal sumbangan fiktif untuk mengemis. Pemanfaatan perilaku mengemis hanya berlaku pada modus mengemis non-konvensional atau mengemis menggunakan proposal sumbangan fiktif. Hasil yang didapat dari mengemis non-konvensional lebih banyak dibandingkan mengemis konvensional.

Pemanfaatan perilaku mengemis untuk mencari penghasilan merupakan sebuah masalah sosial yang kompleks. Sumber daya manusia yaitu perilaku mengemis yang dimiliki mayoritas masyarakat di desa Pragaan Daya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sumber mencari penghasilan. Hal tersebutlah yang mendorong mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, dengan judul penelitian “Pelembagaan Perilaku Mengemis di “Kampung Pengemis”: Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”.

### **Teori Kelembagaan Norman T. Uphoff**

Lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.<sup>9</sup> Norman Uphoff (1986), seorang ahli sosiologi yang banyak berkecimpung dalam penelitian lembaga lokal, menyatakan sangat sulit sekali mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi.<sup>10</sup>

*“..... institutions are complexes of norms and behaviors that persist over time serving collectively valued purposes.”<sup>11</sup>*

Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama)

---

<sup>9</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Hal. 244

<sup>10</sup> [www.nuridafatimah.blogspot.com](http://www.nuridafatimah.blogspot.com) diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 19.54 WIB

<sup>11</sup> Norman T. Uphoff. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*.



untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Norman T. Uphoff merupakan salah seorang penggagas *People-Centered Development Forum* mengajukan definisi sederhana yang membedakan antara organisasi (*organization*) dengan kelembagaan (*institution*) sebagai berikut.

*“Organizations are structures of recognized and accepted roles. Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposes.”*

Organisasi adalah struktur peran yang telah dikenal dan diterima. Kelembagaan/pranata adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan –atau digunakan- selama periode waktu tertentu –yang relatif lama- untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif/bersama atau maksud-maksud sosial.

Dengan demikian kelembagaan menurut Uphoff (1986) berhubungan dengan pola-pola tindakan individu dalam ruang hidupnya. Dalam kaitannya dengan ini, kelembagaan ditentukan pula oleh tingkatan pengambilan keputusan dalam masyarakat, mulai dari individu hingga internasional (Uphoff, 1986:11). Tingkatan pengambilan keputusan terpenting untuk pembangunan pedesaan berada pada level lokalitas sehingga kemudian ia mengajukan kelembagaan lokal sebagai alternatif pembangunan (*local institution development - LID*). Yang dimaksud dengan kelembagaan level lokal adalah level lokalitas (atau setingkat kota kecamatan di Indonesia), level komunitas (seperti desa di Indonesia), dan level grup (seperti kelompok rumah tangga/Rukun Tetangga di Indonesia).

Pada bagian lain, Norman Uphoff menjelaskan argumentasi pentingnya kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan membangun pedesaan (Uphoff:1992,2001). Rasionalisasi bagi kelembagaan lokal itu adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan di level lokal penting untuk memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya dengan suatu pandangan jangka panjang terhadap pemeliharaan dan aktivitas produktif.
2. Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara paling efisien dan berkelanjutan karena menggunakan sistem pengetahuan spesifik lokal.
3. Perubahan status sumber daya dapat dipantau secara lebih cepat dengan biaya rendah.
4. Bila kelembagaan lokal tidak mampu menyelesaikan konflik manajemen sumber daya maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada level yang lebih tinggi.
5. Perilaku orang-orang dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus komunitas.
6. Institusi menendorong orang-orang untuk menggunakan cara pandang jangka panjang melalui harapan-harapan dan basis kerjasama antar-individu yang berkepentingan.

Menurut sektornya (Uphoff:1986) kelembagaan lokal merupakan suatu kontinum antara sektor publik (*public sector*) dan sektor privat (*privat sector*) (Uphoff, 1986:4-5). Di tengah-tengahnya terdapat sektor antara yang bersifat sukarela (*voluntary sector*) yakni dicirikan oleh ciri-ciri publik dan privat. Urutan

kontinum itu adalah administrasi lokal (*local administration*); pemerintahan lokal (*local government*); organisasi sosial berbasis keanggotaan (*membership organizations*) meliputi organisasi dengan tugas jamak, tugas spesifik, dan sesuai kebutuhan anggota; koperasi (*cooperatives*); organisasi bergerak di bidang jasa (*services organizations*); dan bisnis privat (*private business*). Urutan pertama dan kedua adalah kelembagaan sektor publik, urutan ketiga dan keempat sektor sukarela, sedangkan urutan kelima dan keenam adalah sektor privat.

Kelembagaan sebagaimana dimaksudkan oleh Norman Uphoff mengarah pencapaian efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya pedesaan yang meliputi sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, sektor pertanian dan non pertanian (Uphoff, 1986:3). Kelembagaan lokal merupakan salah satu wujud kapital sosial dalam level lokal.

### **Teori Kapital Sosial Norman T. Uphoff**

Formulasi kapital sosial secara mudah juga disampaikan oleh Norman Uphoff, teoretisi dari Cornell University. Dengan sistematis, Uphoff (2000:219-220) mengemukakan bahwa konsep kapital sosial bisa dipahami secara mudah dengan membedakan dua kategori fenomena yang saling terkait, yaitu struktural dan kognitif. Kategori struktural diasosiasikan dengan berbagai bentuk organisasi sosial khususnya peran (*roles*), aturan (*rules*), preseden (*precedent*), prosedur (*procedures*), dan beragam model jaringan (*network*) yang memberi kontribusi terhadap perilaku kerjasama (*cooperation*) dan terutama tindakan kolektif yang mempunyai manfaat timbal-balik (*mutually benefit collection action*). Sedangkan kategori kognitif bersumber dari proses mental serta hasil gagasan-gagasan yang

diperkuat oleh budaya dan ideologi khususnya norma-norma (*norms*), nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), serta sikap dan perilaku (*attitudes*) yang memberi sumbangan terhadap perilaku kerjasama serta tindakan kolektif lain yang memiliki manfaat timbal-balik. Kedua kategori tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain.

Bertolak dari pengertian konseptual yang dipaparkan di atas dapat dimengerti bahwa inti dari Kapital Sosial adalah seperangkat norma-norma (*norms*), jaringan-jaringan (*network*), serta kepercayaan sosial (*trust*) yang terlambat pada struktur sosial. Berbagai anasir kapital sosial ini memungkinkan bagi para anggota komunitas tertentu di dalam masyarakat untuk mengkoordinasikan tindakan dan perilaku kerjasama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang manfaatnya bisa dirasakan secara bersama-sama.

Berdasarkan pengertian konseptual ini para teoretisi sepaham bahwa kapital sosial bukanlah aset pribadi (*private property*) yang dimiliki individu terlepas dari konteks keterlekatan mereka pada struktur sosial. Sebaliknya kapital sosial merupakan suatu kepemilikan kelompok (*Property of groups*). Putnam, misalnya menyebut bahwa yang menjadi ciri utama kapital sosial yakni *trust*, *network*, *norms* adalah dimensi kemaslahatan publik (*public good*) yang dikandungnya. Sebagai *public good*, kapital sosial cenderung tidak disediakan oleh agen-agen pribadi. Sebab itu, menurut Putnam (1993), kapital sosial yang secara tipikal terpatri dalam ikatan-ikatan norma-norma dan kepercayaan adalah sesuatu yang dapat dipindah-gerakkan (*transferable*) dari seseorang kepada orang yang lain.

Untuk mengukur terlaksananya Kapital Sosial dalam suatu organisasi, Uphoff (2000) memberikan 4 kategori yakni Kapital Sosial Minimum, Kapital Sosial Elementer, Kapital Sosial Substansial, dan Kapital Sosial Maximum.

### **Konseptualisasi Permasalahan dengan Teori**

Pelembagaan perilaku mengemis akan dianalisis menggunakan teori kelembagaan oleh Norman T. Uphoff. Budaya perilaku mengemis di desa Pragaan Daya telah menjadi sebuah lembaga, dimana perilaku mengemis dimanfaatkan untuk mencari penghasilan dalam jangka waktu yang panjang secara turun-temurun kepada anak-cucu mereka dan berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut yaitu pemanfaatan perilaku mengemis dalam hubungan kerjasama *mutual benefit*.

Perilaku mengemis yang dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak melalui hubungan kerjasama dengan oknum-oknum tertentu. Perilaku mengemis yang dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* ini akan dianalisis menggunakan teori kapital sosial oleh Norman T. Uphoff.

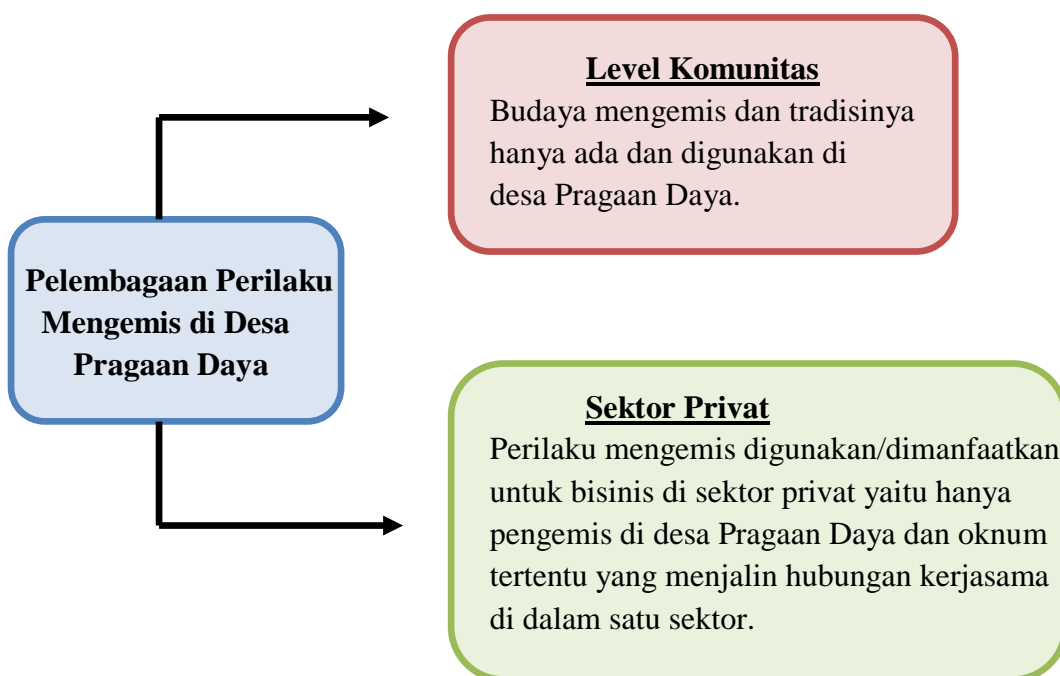
### **Pelembagaan Perilaku Mengemis di “Kampung Pengemis”**

Perilaku mengemis sudah menjadi budaya turun-temurun di desa Pragaan Daya sejak zaman pra kemerdekaan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa tersebut menjadi pengemis untuk mencari penghasilan. Selain itu, pengemis-pengemis di desa tersebut memiliki sebuah tradisi yaitu jika seseorang ingin atau akan menikah dengan orang yang berasal dari desa Pragaan Daya, harus menjadi pengemis terlebih dahulu. Tentu saja tradisi tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya mengemis mereka. Mengemis tersebut telah menjadi sebuah

kelembagaan karena norma –budaya mengemis turun-temurun dan tradisi mengemis untuk masyarakat luar yang akan tinggal di desa tersebut- dan perilaku mengemis telah digunakan selama turun-temurun untuk mencapai tujuan kolektif yaitu mencari penghasilan dan memperkaya diri dengan cara instan.

Jika dianalisis menggunakan teori kelembagaan oleh Norman Uphoff, pelebagaan perilaku mengemis yang ada di desa Pragaan Daya berada di level komunitas yaitu budaya perilaku mengemis dan tradisinya hanya digunakan oleh komunitas atau asosiasi pengemis yang berada di desa tersebut.

### **Pelebagaan Perilaku Mengemis di Desa Pragaan Daya**



Sedangkan sektor pelebagaan perilaku mengemis berada pada sektor privat dimana pengemis memanfaatkan perilaku mengemisnya untuk digunakan sebagai jasa dalam bisnis privat. Bisnis privat tersebut adalah kerjasama antara pengemis dengan oknum tertentu di dalam satu sektor yaitu desa Pragaan Daya.

Dalam hubungan kerjasama tersebut ada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua atau lebih pihak. Mengenai perilaku mengemis yang digunakan sebagai jasa dalam bisnis privat, akan dianalisis menggunakan teori kapital sosial dalam sub bab berikutnya.

Dari data yang didapat peneliti dilapangan, pelembagaan perilaku mengemis di desa Pragaan Daya sangat efektif untuk membangun desa. Perilaku mengemis digunakan atau dimanfaatkan untuk mencari penghasilan secara instan oleh mayoritas masyarakat di desa tersebut. Manifestasi dari hasil mengemis yang mereka dapatkan yaitu berupa rumah, kendaraan bermotor dan hewan ternak merupakan sebuah kesuksesan yang dicapai dengan cara yang mereka pilih yaitu memanfaatkan perilaku mengemis untuk pembangunan pedesaan, dimana sudah hampir tidak ada kemiskinan/orang miskin di desa tersebut.

### **Pemanfaatan Perilaku Mengemis Dalam Hubungan Kerjasama *Mutual Benefit***

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, perilaku mengemis yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat di desa Pragaan Daya dimanfaatkan dalam sebuah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Hal ini berlaku pada pengemis yang menggunakan modus non-konvensional atau mengemis menggunakan proposal sumbangan fiktif. Dengan memanfaatkan perilaku mengemisnya dalam hubungan kerjasama *mutual benefit*, hasil yang didapat pun lebih banyak dibandingkan mengemis konvensional.

Pengemis bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu yaitu pengurus atau penanggungjawab sebuah pondok pesantren, madrasah maupun masjid. Pengemis

hanya perlu menyediakan jasa yaitu memanfaatkan perilaku mengemisnya, sedangkan pengurus atau penanggungjawab tersebut menyediakan fasilitas berupa proposal sumbangan fiktif yang nantinya akan digunakan untuk mengemis. Selain itu, pengemis juga biasanya difasilitasi tempat tinggal selama mengemis di luar pulau Madura.

Di dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* tersebut ada kesepakatan atau aturan yang berlaku sehingga dapat saling memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Pengemis dan penanggungjawab membuat kesepakatan bagi hasil yang adil dan menguntungkan kepada masing-masing pihak. Jika dianalisis menggunakan teori kapital sosial oleh Norman T. Uphoff, fenomena tersebut dapat digolongkan dalam kapital sosial struktural dimana ada peran, aturan, relasi interpersonal maupun prosedur yang mengikat.

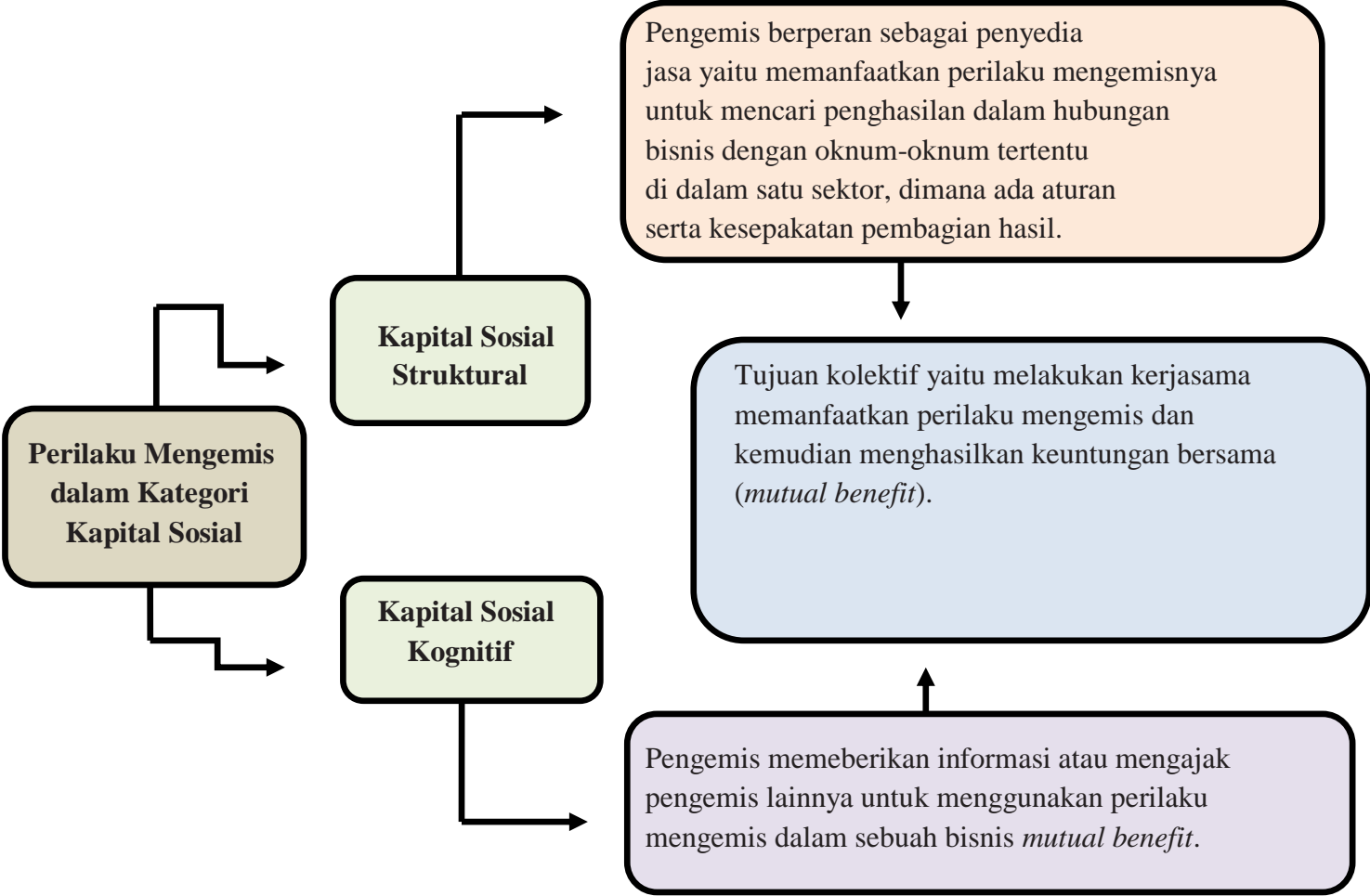
Dalam komplementaritas kapital sosial oleh Uphoff, dibagi menjadi dua yaitu kapital sosial struktural dan kapital sosial kognitif. Kapital sosial struktural pada masalah penelitian ini telah dianalisis pada paragraf sebelumnya. Sedangkan analisis kapital sosial kognitif pada permasalahan penelitian ini adalah pengemis yang menggunakan perilaku mengemisnya dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* kemudian akan mensosialisasikannya kepada masyarakat lainnya yang menjadi pengemis di dalam satu sektor yaitu desa Pragaan Daya.

Pengemis yang satu dengan pengemis lainnya membagi informasi untuk memanfaatkan perilaku mengemis yang dimiliki dalam sebuah bisnis *mutual benefit*, karena dengan cara itu hasil yang didapatkan lebih banyak dibandingkan mengemis konvensional. Hal tersebut sesuai dengan kapital sosial kognitif yang



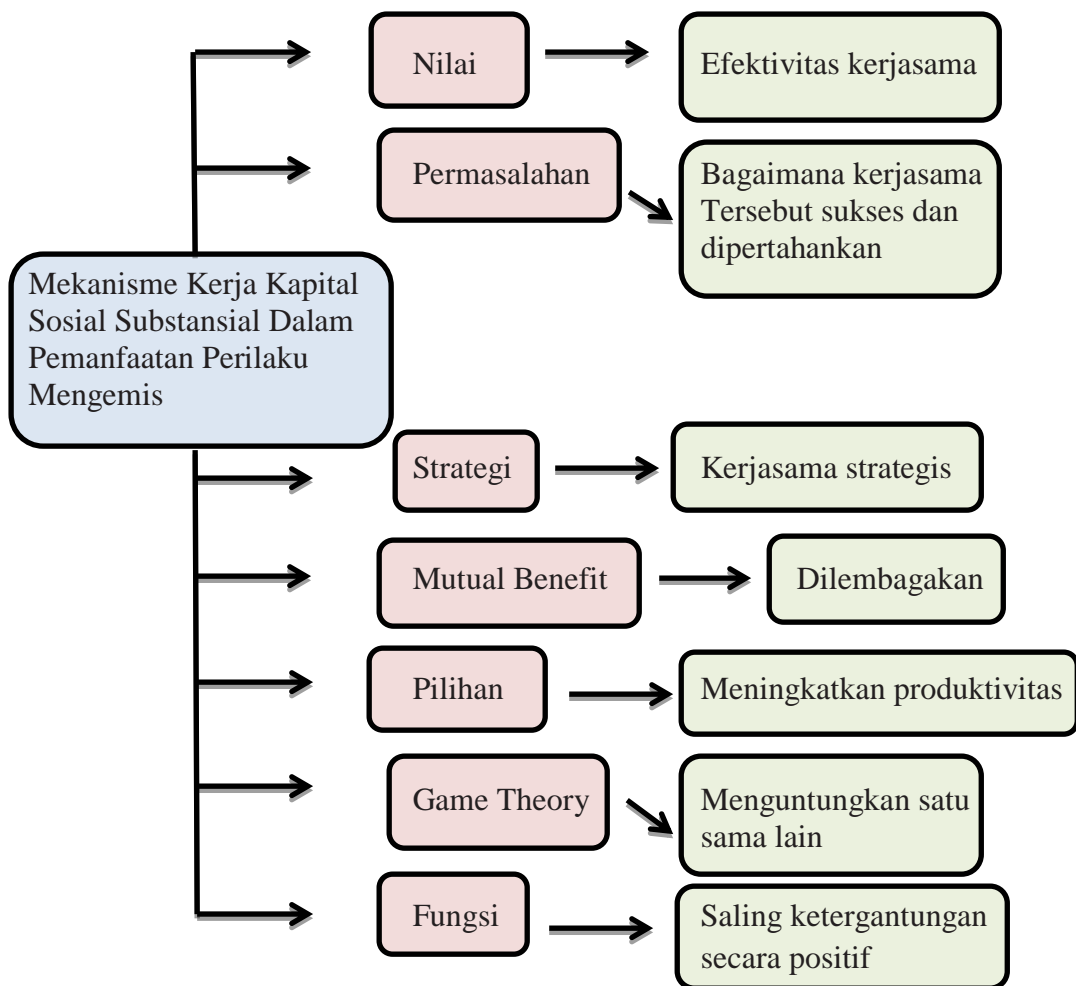
meliputi norma, nilai, sikap dan keyakinan di dalam suatu budaya yang menciptakan solidaritas dan kerjasama. Berikut adalah bagan analisis mekanisme perilaku mengemis dalam kapital sosial di desa Pragaan Daya.

**Pemanfaatan Perilaku Mengemis Dalam Kategori Kapital Sosial**



Setelah menganalisis kapital sosial yang ada di desa Praga Daya ke dalam 2 kategori, yaitu kapital sosial struktural dan kapital sosial kognitif, selanjutnya menggolongkan mekanisme kerja kapital sosial tersebut. Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, mekanisme kerja kapital sosial yang digunakan untuk memanfaatkan perilaku mengemis dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* tersebut digolongkan pada kapital sosial substansial. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut.

### Mekanisme Kerja Kapital Sosial Substansial Dalam Pemanfaatan Perilaku Mengemis



Kapital sosial substansial adalah kerjasama yang terjadi atas dasar komitmen pada usaha bersama dan bermanfaat pada orang lain. Dalam bagan diatas, mekanisme perilaku mengemis pada kapital sosial substansial yaitu:

1. Hubungan kerjasama antara pengemis dengan pengurus madrasah sangat efektif untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan penghasilan.
2. Mempertahankan kesuksesan hubungan kerjasama *mutual benefit* antara pengemis dan pengurus madrasah.
3. Kerjasama yang dilakukan bersifat strategis.
4. Melembagakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dengan mensosialisasikannya kepada pengemis lainnya atau mewariskan kepada anak cucunya.
5. Hubungan kerjasama antara pengemis dan pengurus madrasah saling menguntungkan dengan adanya kesepakatan bagi hasil yang adil.
6. Pengemis dan pengurus madrasah saling ketergantungan satu sama lain, dimana pengemis memberikan jasa berupa perilaku mengemis yang akan dimanfaatkan untuk meminta-minta atau mengemis dan pengurus madrasah memberikan fasilitas berupa proposal sumbangan fiktif serta tempat tinggal selama mengemis di luar pulau Madura.

Perilaku mengemis yang dimanfaatkan dalam hubungan kerjasama *mutual benefit*, tidak akan berjalan jika pengemis tidak memberikan jasanya maupun pengurus madrasah tidak memberikan fasilitas tersebut. Kedua belah pihak saling terikat dan saling membutuhkan satu sama lain.

## **Kesimpulan**

Hasil akhir dari penelitian yang berjudul “Pelembagaan Perilaku Mengemis di “Kampung Pengemis”: Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep” yaitu perilaku mengemis telah menjadi sebuah lembaga yang dijaga kelestariannya secara turun-temurun sejak zaman pra-kemerdekaan dengan menjalankan sebuah tradisi yaitu seseorang harus menjadi pengemis jika akan atau ingin menikah dengan masyarakat yang berasal dari “Kampung Pengemis” di desa Pragaan Daya. Kelembagaan perilaku mengemis tersebut berada pada level komunitas yaitu setingkat desa. Kelembagaan tersebut berlaku di dalam sektor privat yaitu hanya di “Kampung Pengemis” desa Pragaan Daya.

Pengemis di desa Pragaan Daya memanfaatkan perilaku mengemisnya sebagai jasa dalam sebuah hubungan kerjasama *mutual benefit*. Hal ini hanya berlaku untuk pengemis non-konvensional, dimana pengemis bekerjasama dengan oknum tertentu yang menjadi pengurus atau penanggungjawab sebuah lembaga seperti pondok pesantren, madrasah maupun masjid. Pengurus atau penanggungjawab tersebut menyediakan fasilitas berupa proposal sumbangan fiktif, sedangkan pengemis hanya perlu menggunakan perilaku mengemisnya untuk mencari penghasilan. Dalam hubungan kerjasama ini, ada kesepakatan antara kedua atau lebih pihak mengenai pembagian hasil. Pemanfaatan perilaku mengemis dalam hubungan kerjasama *mutual benefit* tersebut berada pada fase kapital sosial substansial yaitu kerjasama yang terjadi atas dasar komitmen usaha

bersama, mempertahankan kesuksesan kerjasama yang saling menguntungkan tersebut dan kemudian melembagakannya.

### **Saran**

Pelembagaan perilaku mengemis merupakan sebuah fenomena sosial yang cukup meresahkan bagi beberapa masyarakat sekitar. Pengemis berpura-pura berdramaturgi, berpura-pura miskin, cacat dan hal lainnya, namun faktanya mereka memiliki kondisi fisik yang kuat untuk bekerja yang lebih terhormat daripada harus meminta-minta. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan mereka berada dalam kondisi perekonomian yang baik dan jauh dari garis kemiskinan.

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberi sedekah kepada pengemis, karena hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan pengemis untuk malas berusaha dan hanya meminta-minta. Selain itu, peneliti juga mendukung pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah perilaku mengemis, baik yang sudah melembaga maupun yang dimanfaatkan pada kapital sosial. Pemerintah harus lebih ekstra dalam membuat dan menjalankan program-programnya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Referensi Buku:

Dimas. 2013. *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Cibubur : Titik Media Publisher.

Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1999. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.

### Daftar Referensi Jurnal:

Mohammad Ali Al Humaidy. *Thesis: Sosialisasi Nilai Pada Pada Komunitas Pengemis (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Sumenep Madura)*. 2003. FISIP Universitas Indonesia.

Kajian Tingkat Kontinum Kapital Sosial Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Oleh Ansharullah diakses melalui <http://www.iainjambi.ac.id/e-journal/index.php.mediaakademika/article/view/459> pada tanggal 12 Juni 2015 pukul 19.22 WIB.

Alief Ferdiani Mulya Pratiwi. Skripsi: *Rekayasa Sumbangan di Ruang Publik (Studi Tentang Tindakan Sosial dan Dinamika Praktik Penggalangan Dana di Ruang Publik Kota Surabaya)*. 2012/2013. FISIP Universitas Airlangga.

### Daftar Referensi Artikel:

Teori Kelembagaan Norman Uphoff diakses melalui <http://nuridafatimah.blogspot.com/2012/06/v-behaviourdefaultvmlo.html?m=1> pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 07.06 WIB.

[www.rri.co.id](http://www.rri.co.id) diakses pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 11.10 WIB

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 17.36 WIB